

Lembaga kehutanan publik di abad dua puluh satu

Menggerakkan perubahan melalui transparansi, reformasi hak pakai, keterlibatan warga negara dan perbaikan tatakelola

MEI 2014

PENULIS

TASSO AZEVEDO

Mantan Direktur Layanan Hutan Brazil

BOEN PURNAMA

Mantan Sekretaris Jendral, Kementerian Kehutanan, Indonesia

DALE BOSWORTH

Mantan Ketua, Layanan Hutan AS

SALLY COLLINS

Mantan Ketua Asosiasi, Layanan Hutan AS

JIM FARRELL

Mantan Asisten Deputi Menteri, Layanan Hutan Kanada

KESHAV KANEL

Mantan Direktur Jenderal, Departemen Kehutanan, Nepal

DOUG KONKIN

Mantan Deputi Menteri, Kementerian Kehutanan, Tanah dan Operasi Sumberdaya Alam, British Columbia, Kanada

JUAN MANUEL TORRES-ROJO

Mantan Direktur Jendral, Komisi Kehutanan Nasional, Meksiko

Selama delapan tahun terakhir, para pemimpin lembaga kehutanan publik di seluruh dunia telah ikut serta dalam serangkaian pertemuan luar biasa yang diselenggarakan oleh Inisiatif Hak dan Sumberdaya (RRI) di berbagai lokasi di seluruh dunia. Kelompok informal yang disebut MegaFlorestais dan beranggotakan para pejabat senior ini, membahas tentang berbagai macam tantangan dan berbagai pengalaman tentang isu-isu penting yang mempengaruhi hutan dan masyarakat kehutanan, termasuk perubahan iklim, perubahan pasar, hak pakai hutan, pengentasan kemiskinan, dan tatakelola publik. Mengingat bahwa lembaga kehutanan publik secara umum mengendalikan sekitar 75 persen dari semua hutan di dunia, dengan sebagian besar lahan hutan berada di negara-negara MegaFlorestais – Australia, Brazil, Kamerun, Kanada, China, Republik Rakyat Kongo, India, Indonesia, Meksiko, Peru, Rusia, dan AS – maka hasil kerja kelompok ini memberikan wawasan global tentang manajemen hutan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Pertemuan MegaFlorestais yang terakhir, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia pada Oktober 2013, membahas “arsitektur tatakelola hutan untuk abad dua puluh satu.” Dengan mempertimbangkan topik ini, anggota MegaFlorestais sepakat bahwa hutan dan tuntutan masyarakat kehutanan akan berbeda di masa mendatang, yang mana perubahannya terjadi secara dramatis dengan kecepatan yang semakin meningkat, sehingga diperlukan pendekatan baru — dan terkadang radikal — terhadap tatakelola hutan. Secara global, kelompok ini meringkas masa depan hutan sebagai berikut:

Perluasan investasi di bidang pertambangan, serta pengembangan pertanian dan energi di wilayah hutan akan menyebabkan meluasnya pembangunan jalan raya, rel kereta api dan jalur pipa yang melintasi hutan-hutan alam yang tersisa. Hutan di mana-mana akan menjadi lebih muda, lebih sederhana strukturnya, dan akan lebih terpecah-pecah. Secara keseluruhan, perubahan ini akan membuat hutan menjadi lebih sulit dikelola, dan dalam beberapa hal, akan jauh lebih mahal, dan produk hutannya akan menjadi kurang dapat diprediksi, sehingga mempengaruhi potensi suplai ke pasar, ketenagakerjaan, mata pencaharian penduduk setempat, dan pendapatan pemerintah.

Sekitar 80 persen dari orang-orang termiskin di dunia yang hidup dan bergantung pada hutan sebagai mata pencaharian mereka akan paling banyak terpengaruh oleh perubahan ini. Penduduk desa diperkirakan akan meningkat di banyak negara berkembang (meskipun tidak secepat penduduk kota). Seperti yang lainnya, orang-orang ini akan mencari masa depan yang lebih baik. Banyak di antaranya yang menggunakan sistem hukum, politik dan pasar untuk menyatakan dan menegaskan hak atas tanah mereka. Mereka menginginkan adanya pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan yang mempengaruhi mereka, seperti hak pakai hutan, peraturan, insentif keuangan, dan mereka juga mencari peluang perdagangan dan pemasaran baru. Sebagai pemegang hak, mereka mengharapkan informasi yang dapat langsung diketahui, serta mengharapkan adanya peran kolaboratif — atau setidaknya bimbingan — dalam pengambilan keputusan.

Pasar nasional dan global untuk produk hutan juga berubah dengan cepat dan melalui cara-cara baru. Sebagai contoh, akan ada pergeseran yang cepat di bidang perkebunan sebagai sumber utama serat komersial; pasar dalam negeri akan tetap penting di banyak negara namun akan tetap semakin diabaikan dalam pengembangan kebijakan global; akan terjadi peningkatan permintaan terhadap kayu sebagai sumber energi dan terhadap produk hutan non-kayu baru maupun tradisional, termasuk biofuel, dan produk baru yang menggunakan nanoteknologi; dan akan ada pemahaman tentang perlunya melestarikan hutan alam untuk kepentingan ekosistem mereka, seperti misalnya, pengadaan air bersih. Permintaan akan lahan hutan menjadi tinggi, mengingat hutan adalah lahan paling subur untuk digunakan. Beberapa negara tetap mencari tahu cara-cara untuk mengalokasikan lahan untuk dijadikan hutan, lahan pertanian dan produksi energi, karena mereka mempertimbangkan ketahanan pangan dan energi seiring dengan pertumbuhan populasi.

Di seluruh dunia, tatakelola hutan harus diubah guna menghadapi tantangan ini, dan akan menjadi lebih kompleks. Banyak lembaga kehutanan publik yang saat ini beroperasi, termasuk di Rusia dan AS, yang didirikan setidaknya satu abad yang lalu dan dirancang secara budaya dan secara organisasi untuk menghadapi urusan yang lebih sederhana. Lembaga yang lainnya—seperti yang ada di Brasil dan Peru—merupakan lembaga baru dan telah merevisi kebijakan dan struktur mereka dalam upaya untuk mengantisipasi tren dan kebutuhan yang lebih modern.

Namun, masih ada lembaga kehutanan publik yang lainnya lagi yang terus berusaha mencari pendekatan baru. Sebagai contoh, di tahun yang sama di mana Layanan Kehutanan British Columbia, Canada, merayakan ulang tahunnya yang ke-100, pemerintah provinsi telah berhasil memadukan sejumlah program sumberdaya alam ke dalam satu organisasi saja. Sebuah lembaga pertanahan kini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai “wadah” yang sebelumnya terpisah-pisah di mata pemerintah seperti misalnya kehutanan, pengembangan energi, air dan pertambangan. Restrukturisasi ini, yang mungkin merupakan pertanda zaman di masa depan, adalah tentang bagaimana mengubah cara berpikir dan cara kerja orang-orang, mengingat ini adalah tentang reorganisasi. Gerakan untuk memadukan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya diarahkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih besar, yang mendukung kerjasama di antara para pemangku kepentingan, dan sesuai dengan “pendekatan satu lahan” yang umum di dalam masyarakat.

Tanpa mempedulikan perbedaan di lembaga-lembaga kehutanan publik — usia lembaga, struktur organisasi dan bahkan sistem politik di tempat lembaga tersebut beroperasi — di seluruh negara MegaFlorestais, kami yakin bahwa prinsip-prinsip berikut ini penting untuk memandu masa depan tatakelola hutan yang efektif di abad dua puluh satu. Prinsip-prinsip tersebut harus memandu lembaga dalam bekerja di luar tugas mereka di mana undang-undang dan peraturan yang ada menghendaki mereka untuk meningkatkan pengelolaan hutan dunia:

1. Transparansi dalam tatakelola sangatlah penting

Data tentang hutan harus dapat diakses secara bebas dan secara mudah oleh warga negara. Warga negara harus memiliki suara dalam penyusunan dan penyesuaian rencana, strategi, undang-undang dan peraturan kehutanan yang mempengaruhi mereka, dan harus ada prosedur keberatan yang jelas dan adil untuk menyelesaikan perselisihan. Penawaran untuk produk hutan yang berasal dari hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat harus adil, terbuka dan kompetitif. Kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus memiliki kemampuan untuk secara aktif memantau kinerja lembaga yang melayani mereka. Warga negara semakin menuntut transparansi dan keterlibatan mereka, dan teknologi baru akan membuat ini lebih mudah dilaksanakan dan, pada akhirnya, tidak mungkin disangkal lagi. Lembaga kehutanan publik dapat membimbing keterlibatan warga negara melalui cara-cara yang efektif dan produktif, untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa keterlibatan itu akan menghasilkan kebijakan dan rencana yang akan lebih bertahan lama dan lebih berarti bagi warga negara.

2. Klarifikasi tentang hak pakai hutan (hak dan kepemilikan lahan) harus menjadi prioritas utama pemerintah

Di negara-negara yang berhutan luas, lembaga kehutanan publik harus bersedia menjadi mitra dan pemimpin dalam perubahan kebijakan tentang hak pakai hutan. Mengakui hak-hak masyarakat dan penduduk pribumi merupakan langkah penting dalam memajukan hak asasi manusia, mengentaskan kemiskinan di wilayah kehutanan, dan melestarikan hutan. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Di banyak negara, upaya untuk menyelesaikan klaim lokal, klaim pribumi dan klaim yang lebih luas untuk kepemilikan lahan hutan berada dalam tahap-tahap awal perkembangan, tetapi pemerintah terus merundingkan hak untuk — atau kepemilikan penuh pada — lahan hutan bagi rumah tangga serta entitas lokal dan historis. Ini sering kali mendorong keberhasilan hasil manajemen lokal. Dalam hal ini, penting untuk mengiringi pengakuan hak dengan pengaturan hak untuk mendorong penggunaan yang berkesinambungan dan pembangunan kapasitas — baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah sehubungan dengan hak dan peran baru mereka. Di semua kasus tersebut, diperlukan kebijakan baru dan pembangunan kapasitas agar masyarakat dapat memanfaatkan hak-hak baru mereka pada lahan hutan. Lembaga kehutanan publik harus membantu memimpin perubahan pada pemilihan lahan hutan dan hak pakai hutan.

3. Diperlukan tatakelola yang inklusif

Kebutuhan masyarakat harus tercakup dalam tatakelola hutan yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Sama pentingnya, sistem pemerintah yang secara efektif melibatkan warga negara di bidang kehutanan akan membuat keputusan yang lebih tangguh dan kuat karena adanya kepercayaan dan dukungan dari pemerintah. Struktur organisasi, maupun kebijakan, rencana dan peraturan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara aktif melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemilik lahan swasta, Penduduk Pribumi, dan masyarakat lokal, dalam tatakelola hutan. Praktik tatakelola yang inklusif mencakup penggunaan teknologi untuk menjangkau warga negara di wilayah terpencil; menyusun peraturan yang mudah dipahami, diterapkan dan ditegakkan; melibatkan pengguna hutan dalam pemantauan dan penegakan hukum; dan membangun dewan penasihat warganegara/pemangku kepentingan yang efektif atau organisasi serupa untuk memasukkan perspektif yang lebih luas.

4. Lembaga kehutanan harus tumbuh

Lembaga kehutanan publik harus dirancang untuk menanggapi kebutuhan warga negara, perubahan dalam tren kehutanan dan tren global. Pemimpin mereka harus mendorong peningkatan yang berkelanjutan, dan terkadang mungkin diperlukan perubahan dramatis pada organisasi agar berada pada posisi yang lebih baik untuk menghadapi perubahan iklim dan tantangan utama lainnya yang muncul. Pemimpin harus bertanggung jawab kepada warga negara atas efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan dan pelayanan pada masyarakat. Banyak lembaga mempertimbangkan bagaimana cara melakukan restrukturisasi untuk melayani kelas pemilik hutan baru yang semakin berkembang, dan mereka beralih dari fokus pada pengelolaan lahan umum ke memungkinkan pengelolaan hutan yang lebih baik oleh masyarakat.

Tema mendesak yang bersifat universal adalah pentingnya membuat mekanisme yang efektif untuk diterapkan di seluruh lembaga yang berpengaruh dalam pengelolaan lahan hutan dan untuk mempromosikan kebijakan yang mendukung kebijakan pengelolaan bidang pertambangan skala regional atau lansekap, sektor air dan pertanian yang sering kali menghindari atau mengurangi pengaruh kebijakan yang terkait dengan kehutanan atau masyarakat yang bergantung pada hutan. Kebijakan yang bertentangan semacam itu harus direkonsiliasi apabila negara ingin mengelola hutan mereka secara berkesinambungan dan untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan kepemilikan hutan dan hak atas lahan hutan.

5. Pemimpin di bidang kehutanan harus memiliki ketrampilan baru

Di seluruh dunia, pemimpin lembaga kehutanan publik kini sedang menghadapi tantangan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya; mereka harus mengasah ketrampilan mereka dan staf mereka jika ingin memimpin secara efektif. Mereka kini beroperasi di lingkungan global, di mana perubahan kebijakan atau peraturan di satu negara dapat berdampak di lingkup internasional, bahkan global. Dengan demikian, pemimpin lembaga kehutanan publik harus memahami kompleksitas global dari hak asasi manusia, organisasi kemasyarakatan dan perusahaan, perdagangan global, tren yang sedang berkembang seputar teknologi baru, pasar, dan perubahan iklim.

Sekalipun pendekatan terbaik akan cenderung berbeda-beda antarnegara, namun himpunan kekuatan lembaga kehutanan publik ini tidak boleh diremehkan. Kekuatan ini dapat digunakan untuk melibatkan lembaga berbasis lahan secara proaktif, serta sektor swasta yang bekerjasama dengan lembaga, untuk memastikan bahwa keputusan yang rasional dan transparan tentang lahan dan penggunaan lahan telah dibuat, dan bahwa, sejalan dengan prosesnya, hak warga negara akan tetap dilindungi. Secara formal atau informal, dan dengan atau tanpa perancangan kembali atau termasuk di dalamnya restrukturisasi organisasi, maka proses pengambilan keputusan antar-sektor harus dilakukan secara aktif, mengingat ini akan sulit bila dilakukan tanpa komitmen politik yang kuat.

Agar berhasil, lembaga kehutanan publik harus membangun sebuah budaya yang inklusif: mereka harus (benar-benar) mendengarkan suara warga negara dan konstituennya. Oleh karenanya, pemimpin lembaga kehutanan publik membutuhkan ketrampilan komunikasi yang sempurna, termasuk dalam konteks lintas-budaya. Mereka membutuhkan ketrampilan mengenai keterlibatan sosial/masyarakat, kerjasama dan penyelesaian konflik, karena masyarakat terus berharap dan menuntut suara yang efektif dalam pengembangan kebijakan kehutanan. Ketrampilan tersebut penting apabila agenda kehutanan bermaksud untuk membangun dan menjaga hubungan positif dengan warga negara dan pemangku kepentingan lainnya. Sesuai peran

nya, MegaFlorestais mendukung simposium pelatihan bagi generasi berikutnya pemimpin lembaga kehutanan publik dan lokakarya tentang “berpikir ulang tentang peraturan kehutanan” yang bertujuan untuk memajukan reformasi peraturan mendukung secara yang lebih hak lahan yang senantiasa berubah-ubah dan praktik terbaik yang muncul. Interaksi yang konsisten dengan kolega mereka di seluruh dunia akan membantu lembaga kehutanan publik dalam memperoleh perspektif yang lebih luas dan pemahaman yang lebih baik tentang konteks global dan dalam berbagi gagasan dan praktik terbaik.

Pemimpin harus menetapkan sasaran yang ambisius dan membimbing organisasi mereka maupun para pemimpin politik untuk mencapai sasaran ini.

Para pemimpin MegaFlorestais mengakui bahwa respons ini membutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Sudah jelas, abad ini akan menjadi saksi bagi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hutan-hutan di dunia. Lembaga kehutanan dapat memberi pengaruh positif terhadap hal ini di masa mendatang atau justru menjadi korbannya. Kami, sekumpulan mantan pemimpin lembaga kehutanan publik dari seluruh dunia —bersama-sama pihak lain di masa lampau dan di masa sekarang— bekerja keras untuk mensukseskan pernyataan pertama tersebut di atas.

MEGAFLORESTAIS

MegaFlorestais merupakan jaringan informal pemimpin agen kehutanan publik yang berdedikasi untuk memajukan dialog internasional dan pertukaran transisi dalam peraturan kehutanan, industri kehutanan, serta peran agen kehutanan publik. Kelompok ini mencakup para ketua agen kehutanan dari negara-negara dengan luas hutan terbesar di dunia, dan menyediakan kesempatan bagi para pemimpin tersebut untuk berbagi pengalaman dan tantangan dengan terus terang dan terbuka. Proses ini bertujuan untuk memperkuat hubungan yang lebih kuat antara para agen kehutanan, dan secara kolektif memperkuat kemampuan mereka untuk memainkan peran utama dalam memecahkan masalah tentang tatakelola kehutanan dan isu-isu kehutanan secara berkelanjutan.

ANGGOTA INTI

Brazil, Kamerun, Kanada, Tiongkok, Republik Demokratik Kongo, India, Indonesia, Meksiko, Peru, Rusia, dan Amerika Serikat

THE RIGHTS AND RESOURCES INITIATIVE

Inisiatif Hak dan Sumberdaya (Rights and Resources Initiative/RRI) bertindak sebagai Sekretariat jaringan MegaFlorestais.

RRI merupakan koalisi dari 14 Mitra dan lebih dari 140 organisasi internasional, regional, dan masyarakat dunia yang berusaha memajukan pemanfaatan lahan hutan, kebijakan dan reformasi pasar. RRI mendorong kolaborasi strategis dan investasi dengan para Mitra dan Kolaboratornya di seluruh dunia melalui kerja sama dalam penelitian, advokasi, dan mengumpulkan pelaku strategis untuk mendorong terciptanya perubahan yang nyata. RRI dikoordinir oleh Rights and Resources Group, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington, DC. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi: www.rightsandresources.org

PENDUKUNG

Inisiatif Hak dan Sumberdaya didukung oleh:



Pendapat yang disajikan di sini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak harus mewakili badan mana pun yang secara umum mendukung pekerjaan ini, atau semua Mitra Koalisi.



1238 Wisconsin Avenue NW
Suite 300
Washington, DC 20007
+1 202 470 3900
www.rightsandresources.org